



Bayar Tunggakan Sertifikasi Guru

PONTIANAK - Anggota BPK RI Rizal Djailil menyatakan ada beberapa persoalan terkait keuangan di bidang pendidikan yang belum terselesaikan, diantaranya menyangkut tunjangan sertifikasi guru. Pada tahun anggaran 2012 ada tunjangan yang belum dibayarkan selama dua bulan.

"Tunjangan tersebut belum dibayarkan kepada pihak yang berhak, sedangkan di sisi lain masih terdapat sisa tunjangan di kas daerah tahun 2012," ujar Rizal dalam rapat koordinasi BPK RI bersama Pemprov

Kalbar dan pemerintah kabupaten kota, Senin (30/9).

Rizal meminta pemerintah yang berwenang segera membayarkan kekurangan tunjangan sertifikasi tersebut. Menurutnya, saat ini masih terdapat kekisruhan persoalan data terkait bidang pendidikan. Permasalahan tersebut menjadi masalah bersama yang harus dicari jalan keluarnya.

Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ahmad Jazidie menjelaskan tunjangan

sertifikasi guru dimulai dari proses sertifikasi. Setelah lulus proses tersebut, terbit surat keputusan dan diberikan kepada pemerintah daerah. Ada transfer yang untuk pembayaran tunjangan sertifikasi.

Dari semua guru pendidikan menengah yang sudah disertifikasi di Indonesia, lanjut Ahmad, hampir 95 persen sampai 98 persen siap dibayarkan tunjangan sertifikasinya. Persoalan bagi tiga sampai lima persen sisanya dikarenakan belum memenuhi beban mengajar 24 jam. Pemenuhan beban

mengajar tersebut harus secara linieritas. Artinya jika belatar belakang pendidikan fisika, harus mengajar mata pelajaran fisika. Tidak bisa dicampur dengan mata pelajaran lainnya.

"Linieritas ini bisa dicapai melalui rum-pun. Misalnya yang belatar belakang fisika bisa mengajar matematika atau kimia," katanya.

Ahmad mengakui adanya kekurangan pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Rata-rata kekurangan selama dua bulan

sejak 2010 hingga 2013. Persoalan tersebut sedang dicari jalan keluarnya. Menurut Ahmad, ada kabar gembira terkait kekurangan pembayaran tunjangan. "Ada uang yang masih tersimpan di masing-masing pemerintah daerah. Yang menggembirakan antara jumlah tunggakan dengan dana yang tersimpan, masih banyak dana yang tersimpan," ungkapnya. Ia memastikan tunggakan tunjangan sertifikasi akan

◆ Ke Halaman 15 kolom 5



Bayar Tunggakan Sertifikasi Guru

Sambungan dari halaman 16

dibayarkan. Ia akan mendesak pemerintah daerah agar uang yang tersimpan bisa segera dibayarkan untuk sertifikasi. "Kami meminta kepada pihak terkait segera menyelesaikan urusan ini," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Alexius Akim membantah tentang pengendapan dana (dana tersimpan) untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru. "Bukan mengendap, tetapi sulit dilakukan pembayaran," kata Akim, kemarin.

Menurut Akim, pihaknya tidak mau dikabarkan sebagai pihak yang tidak bisa membayar dana sertifikasi. "Bukan masalahnya tidak bisa dibayarkan. Memang tidak ada rumusnya untuk membayarkannya," ungkap Akim.

Ia menjelaskan untuk membayar tunjangan sertifikasi guru, harus menambah Rp4 miliar dalam satu bulan. Apalagi jika harus membayar dua bulan, anggarannya menjadi lebih besar.

Akim menyatakan dirinya telah meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten dan kota agar segera mengembalikan dana yang tidak bisa digunakan untuk melakukan pembayaran tersebut kepada kas negara, sesuai anjuran Badan Pemeriksa Keuangan RI. "Ini sudah kami lakukan, karena tidak ada aturan yang mengatakan bisa membayar setengah bulan. Ini permasalahan," katanya.

Akim menambahkan persoalan lainnya adalah adanya rekening guru Kalbar yang dibukakan di Jakarta. "Jangan sampai muncul pikiran negatif guru karena persoalan terse-

but," katanya.

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji meminta tunjangan sertifikasi guru tidak masuk ke dalam APBD. Masuknya tunjangan tersebut ke dalam APBD akan membebani pemkot, terutama untuk belanja tidak langsung. "Akam membebani kita untuk belanja langsung karena ini bukan kebijakan kita," ungkap Sutarmidji, kemarin.

Ia menjelaskan belanja tidak langsung Pemerintah Kota Pontianak mencapai 45,6 persen. Dari jumlah tersebut 9,4 persen untuk sertifikasi guru. Akibatnya, pemkot tidak bisa meminta formasi pegawai karena belanja pegawainya dianggap masih tinggi. "Kota Pontianak membuat rumah sakit. Tetapi formasi yang diberikan hanya 50 orang, padahal perlunya 200 sampai 300 orang," ungkapnya. **(uni)**